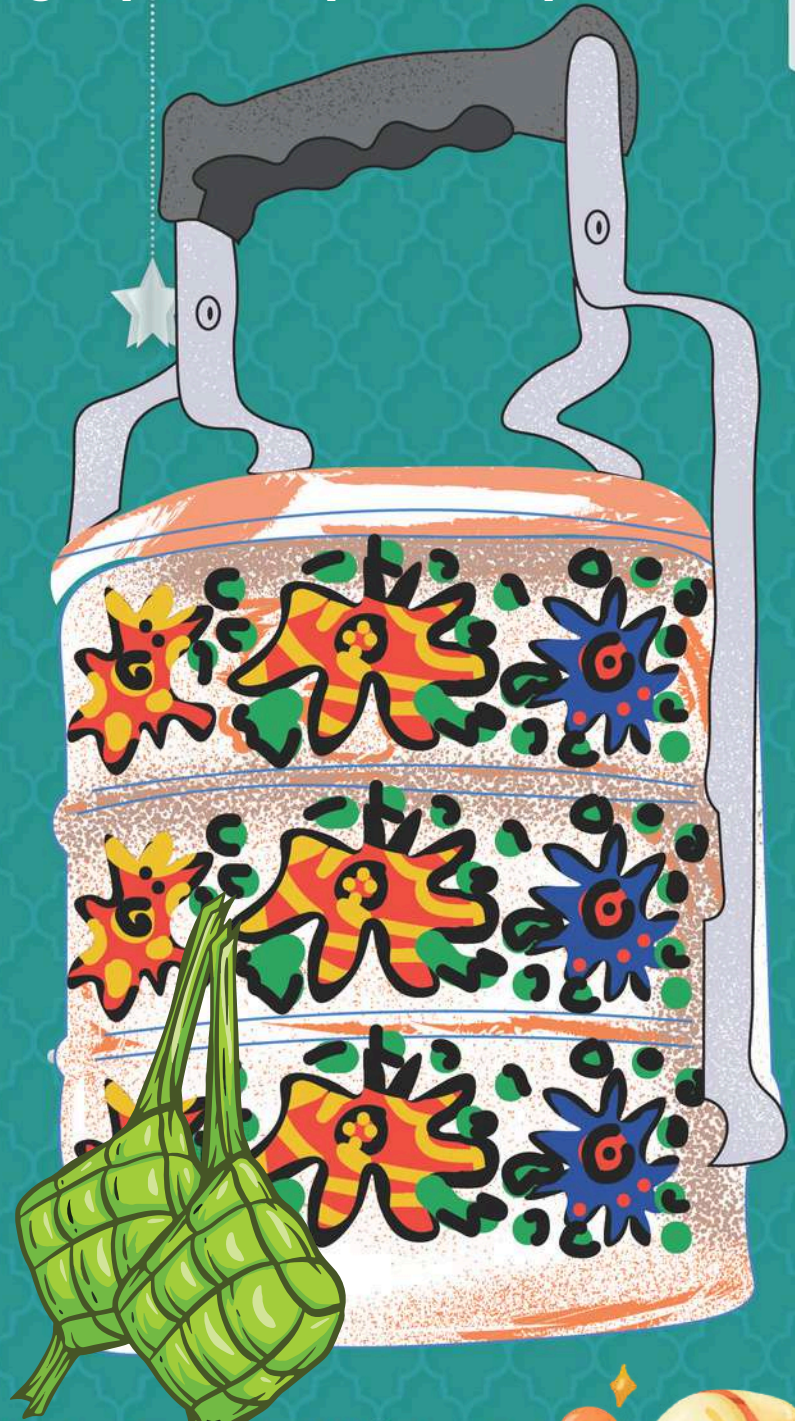




InAng Cetar

Informasi APBN yang Cepat, Transparan, Responsif



HIDUP KENA SUKA
RAYA TETAP RAYA





Selayang Pandang

D

engan memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar berhasil menerbitkan Buletin Inang Cetar Edisi I 2025.

Buletin ini disusun sebagai bentuk sarana atau media publikasi informasi, komunikasi, dan edukasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar kepada seluruh mitra KPPN Pematang Siantar dan juga seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun terkait perkembangan kinerja keuangan atas pengelolaan APBN yang dilakukan oleh KPPN Pematang Siantar.

Buletin Inang Cetar Edisi I kali ini memuat *timeline* kegiatan KPPN Pematang Siantar sepanjang triwulan I tahun 2025 serta informasi realisasi APBN periode sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang disalurkan oleh KPPN Pematang Siantar. Selain itu, edisi kali ini memuat artikel-artikel menarik seputar Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2025 pada KPPN Pematang Siantar, Efisiensi Anggaran dan Strategi Mengatasinya, Kartini Masa Kini “Penggerak UMKM, Penopang Ekonomi”, Mengatasi Retur SP2D “Strategi Efektif untuk Kelancaran Pencairan Dana”, dan Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPPN Pematang Siantar.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan buletin Inang Cetar. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buletin ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Selamat membaca. Kami harapkan buletin ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi *stakeholders* dan seluruh masyarakat untuk mendukung keuangan daerah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dan keuangan nasional menuju Indonesia Maju.



Nova Juliana Sianturi

Kepala KPPN Pematang Siantar

Daftar ISI

i	SELAYANG PANDANG
iii	DAFTAR ISI
01	KINERJA REALISASI APBN TRIWULAN I 2025
05	PEMBAYARAN THR TAHUN 2025
06	EFISIENSI ANGGARAN DAN STRATEGI MENGATASINYA
08	KARTINI MASA KINI, PENGGERAK UMKM, PENOPANG EKONOMI

Daftar ISI

11 **MENGATASI RETUR SP2D:
STRATEGI EFEKTIF UNTUK
KELANCARAN PENCAIRAN
DANA**

14 **KEBERLANJUTAN
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI**

- ***TIMELINE***

- **TIMBUL (TIM BULETIN)**

Kinerja Realisasi APBN Triwulan I 2025

Lingkup KPPN Pematang Siantar

Perkembangan realisasi anggaran hingga Maret, atau selama triwulan pertama, di wilayah kerja KPPN Pematang Siantar, yang mencakup Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, menunjukkan tren positif yang signifikan dari tahun ke tahun.



Pada Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran belanja di KPPN Pematang Siantar mencapai Rp4.408.091.668.000,- yang terdiri dari pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.108.734.828.000,- dan pagu anggaran belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp3.299.356.840.000,-. Hingga Maret 2025, realisasi anggaran belanja telah mencapai Rp978.239.900.403, atau 22,19% dari total pagu anggaran.

Gbr. Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan I Pada KPPN Pematang Siantar (yoy)

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi anggaran belanja pada Triwulan I 2025 meningkat sebesar 2,19%. Peningkatan realisasi anggaran belanja ini didukung dengan adanya pertumbuhan positif pada realisasi anggaran belanja TKD sebesar 18,42%, meski belanja K/L mengalami pertumbuhan negatif (-23,49%) yang dapat dilihat lebih rinci pada tabel di bawah ini:

Jenis Belanja	TW I 2024 (y-1)		TW I 2025		growth Realisasi (yoy)
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	
BELANJA K/L	Rp1.239.438.507.000	Rp370.639.946.468	Rp1.108.734.828.000	Rp283.580.335.911	▼ -23,49%
51 - Blj. Pegawai	Rp818.937.396.000	Rp223.779.005.722	Rp829.174.241.000	Rp237.114.622.630	▲ 5,96%
52 - Blj. Barang	Rp372.963.309.000	Rp144.613.582.746	Rp240.022.417.000	Rp44.568.419.121	▼ -69,18%
53 - Blj. Modal	Rp47.537.802.000	Rp2.247.358.000	Rp39.538.170.000	Rp1.897.294.160	▼ -15,58%
BELANJA TKD	Rp3.194.186.795.000	Rp586.593.297.910	Rp3.299.356.840.000	Rp694.659.564.492	▲ 18,42%
61 - DBH	Rp92.900.835.000	Rp5.791.387.160	Rp108.836.482.000	Rp9.534.967.500	▲ 64,64%
62 - DAU	Rp2.049.797.287.000	Rp495.654.560.750	Rp2.136.692.418.000	Rp578.827.472.000	▲ 16,78%
63 - DAK Fisik	Rp235.036.598.000	Rp0	Rp206.384.688.000	Rp0	▬ 0,00%
64 - DID	Rp6.737.985.000	Rp0	Rp7.327.354.000	Rp0	▬ 0,00%
65 - DAK NonFisik	Rp476.739.420.000	Rp85.147.350.000	Rp507.355.380.000	Rp97.467.162.426	▲ 14,47%
66 - Dana De sa	Rp332.974.670.000	Rp0	Rp332.760.518.000	Rp8.829.962.566	▬ 0,00%
TOTAL	Rp4.433.625.302.000	Rp957.233.244.378	Rp4.408.091.668.000	Rp978.239.900.403	▲ 2,19%

Gbr. Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Triwulan I

Kinerja Realisasi APBN TW I 2025

Lingkup KPPN Pematang Siantar

A. Kinerja Realisasi Anggaran Belanja K/L

Pada periode TW I 2025, kinerja realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) menunjukkan beberapa perubahan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pagu anggaran belanja pegawai meningkat dari Rp818,94 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp829,17 miliar pada tahun 2025, dengan realisasi yang juga naik dari Rp223,78 miliar menjadi Rp237,11 miliar, mencatat pertumbuhan sebesar 5,96%. Namun, belanja barang mengalami penurunan drastis, dengan pagu anggaran turun dari Rp372,96 miliar menjadi Rp240,02 miliar dan realisasi menurun dari Rp144,61 miliar menjadi Rp44,57 miliar, mencatat penurunan sebesar 69,18%. Belanja modal juga mengalami penurunan, dengan pagu anggaran turun dari Rp47,54 miliar menjadi Rp39,54 miliar dan realisasi menurun dari Rp2,25 miliar menjadi Rp1,90 miliar, mencatat penurunan sebesar 15,58%.

Secara keseluruhan, total pagu anggaran belanja K/L menurun dari Rp1,24 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,11 triliun pada tahun 2025, dengan realisasi yang juga menurun dari Rp370,64 miliar menjadi Rp283,58 miliar, mencatat penurunan sebesar 23,49%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan signifikan dalam belanja barang dan belanja modal, meskipun belanja pegawai menunjukkan pertumbuhan positif.

Salah satu faktor penyebab penurunan pagu dan realisasi anggaran belanja pemerintah adalah kebijakan penghematan anggaran/kebijakan efisiensi yang diterapkan untuk mengatasi tekanan fiskal yang meningkat. Pemerintah berupaya mengurangi anggaran belanja yang dianggap kurang produktif, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan pengeluaran lainnya yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pembangunan.

Sementara itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan anggaran digunakan secara efisien, dana yang dihemat dari belanja kurang produktif dialihkan ke sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Adapun kinerja total realisasi anggaran belanja K/L dapat dilihat lebih rinci pada grafik berikut:



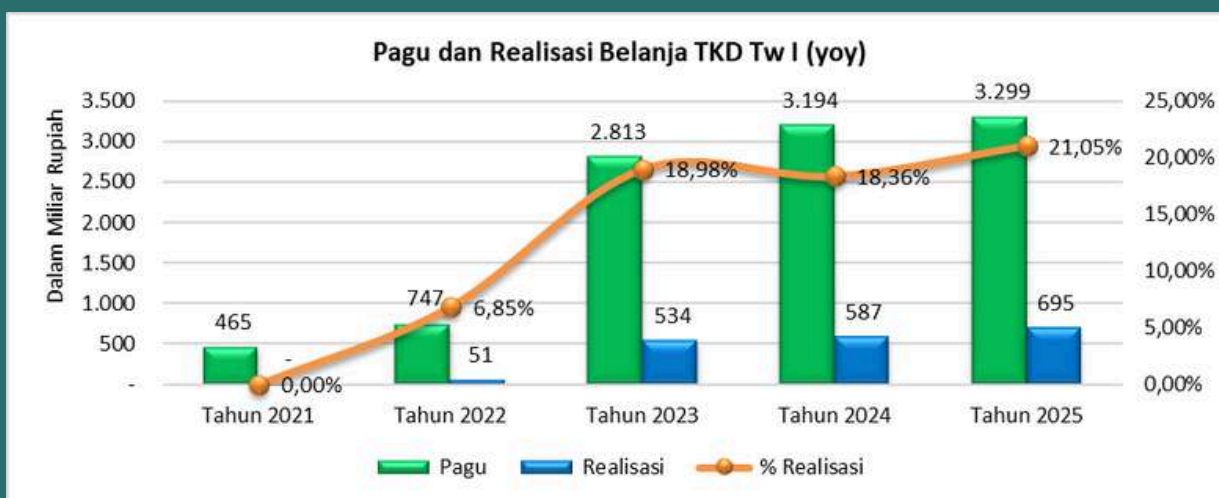
Gbr. Grafik Pagu dan Realisasi Belanja K/L Tw I (yoy)

Kinerja Realisasi APBN TW I 2025

Lingkup KPPN Pematang Siantar

B. Kinerja Realisasi Anggaran Belanja TKD

Pada tahun 2025, kinerja realisasi anggaran belanja Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi dibandingkan dengan tahun 2024. Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami peningkatan signifikan, dengan pagu anggaran naik dari Rp92,90 miliar menjadi Rp108,84 miliar dan realisasi meningkat dari Rp5,79 miliar menjadi Rp9,53 miliar, mencatat pertumbuhan sebesar 64,64%. Dana Alokasi Umum (DAU) juga menunjukkan peningkatan, dengan pagu anggaran naik dari Rp2,05 triliun menjadi Rp2,14 triliun dan realisasi meningkat dari Rp495,65 miliar menjadi Rp578,83 miliar, mencatat pertumbuhan sebesar 16,78%. Namun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan, dengan pagu anggaran turun dari Rp235,04 miliar menjadi Rp206,38 miliar dan sa,mpai dengan triwulan I belum terdapat realisasi anggaran untuk belanja ini baik pada tahun ini maupun pada tahun sebelumnya. Dana Insentif Daerah (DID) mengalami peningkatan pagu anggaran dari Rp6,74 miliar menjadi Rp7,33 miliar, meskipun belum terdapat realisasi anggaran belanja pada periode ini. DAK Non-Fisik menunjukkan pertumbuhan positif, dengan pagu anggaran naik dari Rp476,74 miliar menjadi Rp507,36 miliar dan realisasi meningkat dari Rp85,15 miliar menjadi Rp97,47 miliar, mencatat pertumbuhan sebesar 14,47%. Dana Desa mengalami sedikit penurunan pagu anggaran dari Rp332,97 miliar menjadi Rp332,76 miliar, namun realisasi meningkat dari nol menjadi Rp8,83 miliar. Secara keseluruhan, total pagu anggaran TKDD meningkat dari Rp3,19 triliun menjadi Rp3,30 triliun, dengan realisasi meningkat dari Rp586,59 miliar menjadi Rp694,66 miliar, mencatat pertumbuhan sebesar 18,42%. Adapun kinerja total realisasi anggaran belanja TKD dapat dilihat lebih rinci pada grafik berikut:



Gbr. Grafik Pagu dan Realisasi Belanja K/L Tw I (yoy)

Kontributor:

Trisfla Delvia (PTPN Mahir KPPN Pematang Siantar)

REALISASI TKD

Periode 1 Januari s.d. 31 Maret 2025

Total alokasi anggaran transfer ke daerah yang ada di KPPN Pematang Siantar adalah sebesar Rp3.178.737.718.000 yang terdiri dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.022.340.320.000, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp102.569.458.000, DAK Fisik sebesar Rp206.384.688.000, DAK Non Fisik sebesar Rp507.355.380.000, Dana Desa sebesar 332.760.518.000, dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp7.327.354.000.

Total realisasi sampai dengan triwulan I TA 2025 adalah sebesar Rp694.659.564.492 (21,85%) yang terdiri dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp578.827.472.000 (28,62%), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp9.534.967.500 (9.30%), DAK Fisik sebesar Rp22.106.547.738 (9%), DAK Non Fisik sebesar Rp97.467.162.426 (44,5%), Dana Desa sebesar Rp8.829.962.566 (2,65%), dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp0 (0%).

Dana transfer ke daerah pada KPPN Pematang Siantar disalurkan kepada dua pemerintah daerah; Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun. Yuk, Sobat, kita lihat realisasi transfer ke daerah per masing-masing pemerintah daerah.

Jenis Transfer	Pagu	Realisasi	Persentase
DBH	102.569.458.000	9.534.967.500	9.30%
DAU	2.022.340.320.000	578.827.472.000	28.62%
DAK FISIK	206.384.688.000	0	0,0%
Otsus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Insentif Daerah	7.327.354.000	0	50,0%
DAK Non Fisik	507.355.380.000	97.467.162.426	44,5%
Dana Desa	332.760.518.000	8.829.962.566	2.65%

Tabel Pagu dan Realisasi Transfer Ke Daerah Tw I 2025

PEMBAYARAN THR TAHUN 2025 PADA KPPN PEMATANG SIANTAR

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada awal bulan Maret 2025, Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan yang mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 melalui Peraturan Pemerintah No. 11/2025. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah memberikan THR dan Gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 di mana THR akan dibayarkan dua minggu sebelum Hari Raya Idulfitri, yang mulai dicairkan pada hari Senin, 17 Maret 2025, sedangkan Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 triliun, yang meliputi ASN Pusat dan TNI sebesar Rp 17,7 triliun, Pensiunan sebesar Rp 12,45 triliun, dan ASN Daerah sebesar Rp 19,3 triliun untuk pembayaran THR pada tahun 2025. Anggaran ini teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Secara keseluruhan, THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah termasuk PNS, PPPK, prajuri TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima.

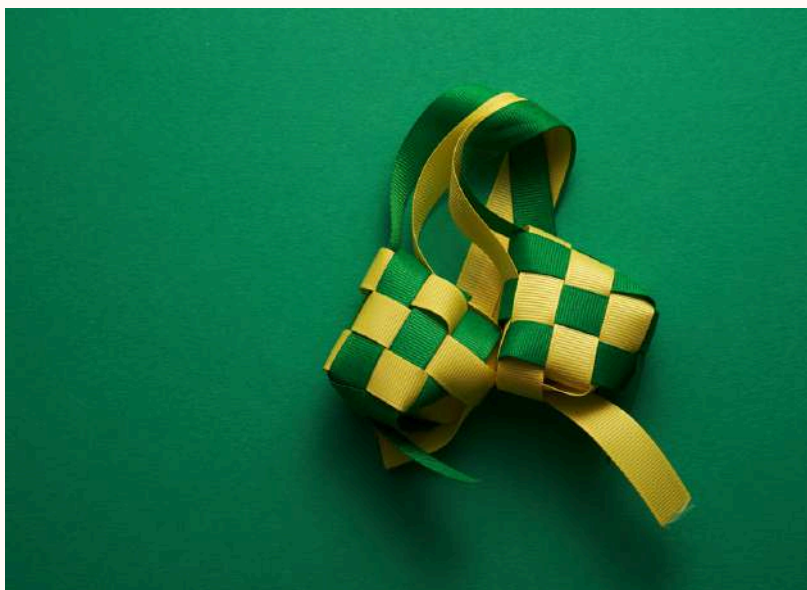
THR diberikan untuk mendukung kebutuhan perayaan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 2025, yang diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga sehingga dapat meningkatkan daya beli dan mendukung perekonomian, baik regional maupun nasional. Sementara Gaji ke-13 ditujukan sebagai bantuan bagi aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Terkait pembayaran THR tersebut, KPPN Pematang Siantar secara keseluruhan telah menyalurkan THR tahun 2025 kepada seluruh PNS/TNI/POLRI/PPPK/PPNPN dari seluruh satuan kerja dalam wilayah kerjanya, yaitu Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, di mana Pembayaran THR tersebut telah dibayarkan sesuai dengan jadwal dalam aturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data OM-SPAN, KPPN Pematang Siantar telah menyalurkan THR tahun 2025 sebesar Rp49.597.534.801 kepada 13.732 penerima yang meliputi PNS, TNI, POLRI, PPPK, dan PPNPN. Dalam penyaluran THR tersebut, tidak terdapat atau tidak ditemukan adanya permasalahan ataupun kendala, sehingga KPPN Pematang Siantar dapat menyalurkannya dengan baik dan lancar.

Kontributor:

Zulfan (Kepala Seksi Pencairan Dana)



EFISIENSI ANGGARAN DAN STRATEGI MENGATA- SINYA



Kebijakan efisiensi anggaran telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. APBN Tahun 2025, yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024, harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali imbas kebijakan yang diambil Presiden ke-8 itu. Dari kebijakan efisiensi yang dilakukan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun dengan perincian sebesar Rp256,1 triliun dari pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga dan sebesar Rp50,59 Triliun dari pemangkasan transfer anggaran ke daerah. Jumlah uang yang berhasil diefisiensi itu akan digunakan untuk mendanai program-program prioritas Presiden. Anggaran yang dipangkas merupakan pos-pos belanja yang tidak esensial.

Dalam konteks Manajemen Keuangan, efisiensi adalah hal yang lumrah dilakukan. Efisiensi anggaran merupakan strategi yang dilakukan organisasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Keterbatasan sumber daya menjadi dasar pertimbangannya. Pada umumnya, efisiensi anggaran dilakukan dengan cara mengalihkan atau mengurangi penggunaan sumber daya untuk menunjang kegiatan atau tujuan yang dianggap lebih prioritas. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pemerintah melakukan efisiensi anggaran dalam upaya menyesuaikan penggunaan dana secara tepat. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya pemborosan sumber daya keuangan dan memastikan setiap anggaran mampu memberi hasil yang optimal.

Kebijakan efisiensi anggaran telah ditetapkan dengan segala pertimbangannya. Sebagai garda terdepan dalam pengelolaan keuangan negara, tugas kita adalah memastikan efisiensi anggaran tidak menyebabkan kualitas layanan yang diberikan berkurang, serta menjaga kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi kita berjalan dengan baik. Hal ini tentu saja tidak mudah dilakukan. Menggunakan sumber daya yang serendah-rendahnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya merupakan tantangan ekonomi yang harus kita atasi. Dalam implementasinya, dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian (adaptasi) atau bahkan, jika diperlukan, perubahan pola perilaku dan pola kerja. Jika kita bisa mengatasi tantangan ini, pemerintahan yang berjalan efisien tidak hanya sekadar tujuan yang digaung-gaungkan. Pemerintahan yang efisien dan agile sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.

Strategi yang tepat perlu dilakukan dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Langkah pertama yang bisa dilakukan ialah meneliti kembali prioritas kegiatan, kegiatan inti (*core business*), dan kegiatan penunjang. Kegiatan inti merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberian layanan atau pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Penggunaan sumber dana yang tersedia diutamakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan utama ini. Langkah berikutnya adalah meniadakan kegiatan-kegiatan yang tidak esensial atau tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi utama organisasi. Efisiensi anggaran utamanya menyasar kegiatan-kegiatan semacam ini. Salah satu yang menjadi sorotan ialah kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan maka dilakukan secara sederhana.

Strategi berikutnya ialah mengurangi pos-pos pengeluaran yang bersifat mendukung. Perjalanan dinas menjadi pos yang menjadi perhatian besar dalam pelaksanaan efisiensi anggaran. Perjalanan dinas harus dilaksanakan secara selektif. Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan inti memang harus dilakukan karena terkait dengan kinerja organisasi. Namun demikian, perlu dipertimbangkan kembali mengenai jumlah personil dan waktu penugasan. Selain itu, langganan daya dan jasa perlu juga dievaluasi. Penghematan dalam penggunaan listrik dan air perlu terus dilakukan. Dari hal-hal kecil, anggaran yang diefisiensi bisa sangat besar. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan digitalisasi menjadi strategi yang juga bisa dilakukan dalam mengatasi efisiensi anggaran. Dengan memanfaatkan TI, kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan secara fisik (*luring*) bisa dilakukan secara daring. Dengan digitalisasi, penggunaan kertas dan alat tulis bisa dikurangi secara signifikan. Selain itu proses bisnis yang konvensional bisa disederhanakan dengan memanfaatkan perkembangan TI.

Terakhir, Inovasi dan perubahan pola kerja menjadi strategi yang dapat diterapkan dalam mengurangi penggunaan sumber daya. Dengan keterbatasan sumber daya, Inovasi dan kreatifitas perlu terus dikembangkan. Terobosan-terobosan dalam cara kerja baru yang efisien menjadi hal penting untuk terus dilakukan. Penerapan cara kerja yang fleksibel tanpa terikat oleh ruang dan waktu dimungkinkan dengan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, perubahan pola pikir juga diperlukan. Pekerjaan dilakukan dengan berorientasi pada hasil kerja (*output oriented*), bukan pada proses administrasi dan birokrasi yang rumit.

Berbagai tanggapan atas kebijakan efisiensi anggaran memang menimbulkan kegelisahan, pro dan kontra. Namun, efisiensi bukanlah akhir segalanya. Bahkan, efisiensi anggaran bisa mendorong kita untuk lebih progresif dan inovatif. Pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien menjadi ikhtiar kita demi kemajuan bersama. Keterbatasan adalah hal yang lumrah. Mengatasi keterbatasan yang ada sehingga bisa terus bertumbuh menunjukkan kualitas diri kita. Untuk itu, para punggawa keuangan negara harus mampu mengelola anggaran yang ada dengan baik, sehingga amanah yang diberikan dapat terus terjaga.

Kontributor:

Surya Hadi Purnama (Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi)



KARTINI MASA KINI, PENGGERAK UMKM, PENOPANG EKONOMI

Setiap tanggal 21 April, Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai momentum untuk mengenang perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, memperjuangkan kesetaraan dan pendidikan. Semangat Kartini yang terkenal dengan gagasannya 'Habis Gelap, Terbitlah Terang' kini hidup dalam ragam bentuk perjuangan perempuan masa kini, salah satunya melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, semangat Kartini tercermin dalam kegigihan perempuan-perempuan pelaku UMKM yang terus bertahan, berinovasi, dan mengembangkan usahanya meski berada di berbagai tantangan. Mereka tidak hanya menjadi penggerak ekonomi keluarga, tapi juga menjadi agen perubahan di masyarakat. Pemberdayaan perempuan melalui UMKM di kota ini menjadi bukti nyata bahwa semangat Kartini tidak pernah padam—justru semakin relevan di era modern.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara, hingga tahun 2024, terdapat 26.869 UMKM yang terdaftar di Pematangsiantar. Sebagian besar pelaku usaha ini adalah perempuan, terutama di sektor kuliner, kerajinan tangan, dan jasa. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penopang kesejahteraan keluarga dan penggerak sosial di komunitasnya.

Namun, di balik kontribusi tersebut, perempuan pelaku UMKM masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pembangunan yang inklusif.

Contoh nyata bisa dilihat dari pelaku usaha kecil di Pasar Horas yang banyak digerakkan oleh ibu-ibu penjual makanan tradisional Batak, serta pelaku UMKM di daerah Simarito dan Tomuan yang mulai memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk mereka secara daring. Tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM antara lain:

1. Akses terhadap Modal Usaha yang minim

Banyak perempuan pelaku UMKM yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan karena kurangnya agunan, riwayat kredit, atau dokumen legal usaha yang memadai.

2. Literasi Keuangan dan Digital Masih Rendah

Sebagian besar pelaku usaha perempuan masih mengelola keuangan secara manual dan belum optimal memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar.

3. Keterbatasan Waktu dan Beban Ganda

Perempuan pelaku usaha sering menghadapi beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan pengelola usaha, sehingga sulit mengikuti pelatihan atau memperluas jejaring bisnis.

4. Kurangnya Pendampingan dan Promosi Produk

Banyak usaha rumahan yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi belum mendapatkan dukungan promosi dan bimbingan pengembangan usaha dari pemerintah atau lembaga terkait.



Strategi Pemberdayaan di Tingkat Lokal

1. Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

Program pelatihan yang fleksibel dan melibatkan komunitas seperti PKK atau kelompok arisan dapat menjadi solusi agar perempuan dapat belajar tanpa meninggalkan tanggung jawab rumah tangga. Perempuan dapat saling berbagi ilmu dan pengalaman melalui komunitas tersebut.

2. Digitalisasi UMKM

Banyak pelaku UMKM adalah ibu-ibu dan perempuan yang sudah berumur dan belum melek teknologi. Pelatihan sederhana tentang cara menggunakan Instagram, WhatsApp Business, hingga marketplace seperti Tokopedia atau Shopee bisa membantu pelaku usaha perempuan menjangkau konsumen yang lebih luas.

3. Perkuat Akses Permodalan

Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat memperkuat kerja sama dengan bank daerah, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan skema pembiayaan ringan bagi usaha mikro milik perempuan.

4. Pameran dan Branding Produk Lokal

Mengadakan bazar rutin atau festival UMKM yang melibatkan pelaku usaha perempuan akan membantu mengenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas, sekaligus membangun rasa percaya diri bagi pelaku UMKM.

5. Pembentukan Forum UMKM Perempuan

Dengan adanya forum atau komunitas pelaku usaha perempuan, mereka dapat saling berbagi pengalaman, memperluas jejaring, dan belajar bersama.

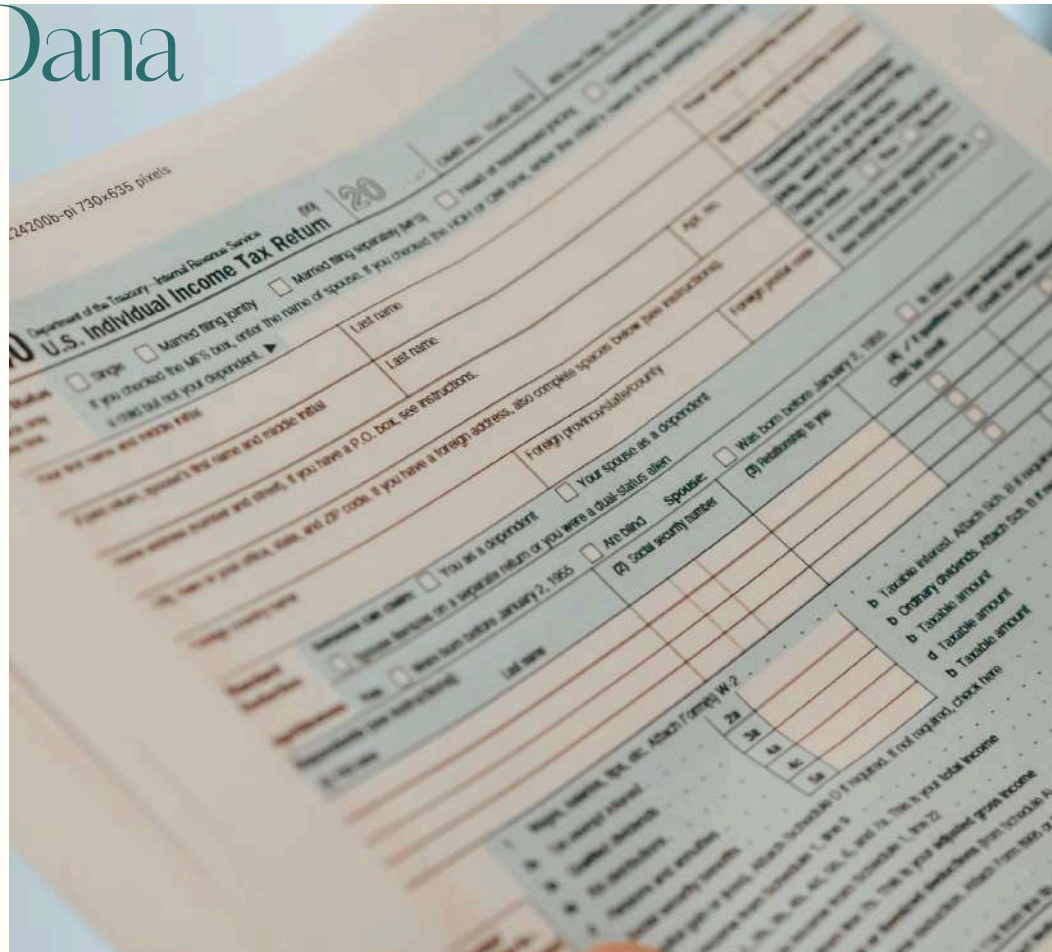
Pemberdayaan UMKM perempuan bukan hanya sekedar bicara meningkatkan perekonomian, tapi juga bentuk pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam mencapai tujuan bernegara. Perempuan diberdayakan, maka keluarga menjadi lebih sejahtera, komunitas menjadi lebih kuat, dan ekonomi menjadi lebih inklusif.

Perempuan dan UMKM adalah dua kekuatan besar yang saling menguatkan. Dengan dukungan yang tepat — baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat— perempuan pelaku UMKM dapat menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Mari wujudkan ekosistem usaha yang ramah perempuan, karena ketika perempuan maju, Indonesia pun ikut tumbuh.

Kontributor:

Tommy Hansen Panjaitan (Kepala Seksi Bank)

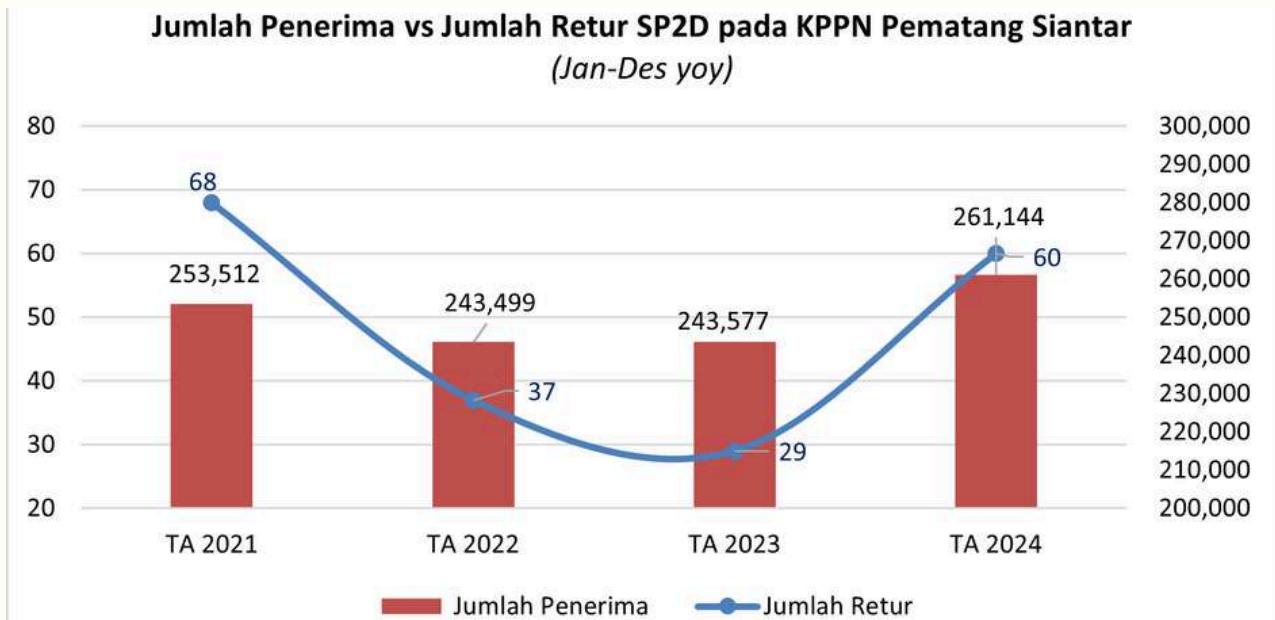
Mengatasi Retur SP2D: Strategi Efektif untuk Kelancaran Pencairan Dana



Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai dasar pencairan dana berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun, dalam proses pencairan dana, sering kali terjadi Retur SP2D, yaitu penolakan atau pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan dana dari bank penerima kepada bank pengirim.

Retur SP2D terjadi ketika dana yang seharusnya masuk ke rekening penerima tidak berhasil ditransfer oleh bank penerima. Retur SP2D sering terjadi karena berbagai kesalahan yang tampak sepele namun berdampak besar. Kesalahan penulisan nama rekening, nomor rekening yang salah, atau nama bank penerima yang tidak sesuai bisa membuat dana tersasar dan kembali ke pengirim atau tidak sampai ke rekening tujuan/penerima. Selain itu, alasan lainnya mengapa terjadi Retur SP2D adalah rekening penerima yang tidak aktif, tutup, atau pasif dan rekening yang telah di blokir oleh pihak bank. Bayangkan dana yang sangat dibutuhkan terhenti di tengah jalan hanya karena satu angka yang tertukar atau rekening penerima dormant.

Pada KPPN Pematang Siantar sendiri, terdapat 194 Retur SP2D atau 0.02% dari 1.001.732 penerima sejak 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2024 yang secara rinci untuk masing-masing tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gbr. Grafik Jumlah Penerima vs Jumlah Retur SP2D pada KPPN Pematang Siantar yoy

Apabila dibandingkan dengan jumlah penerima selama kurun waktu 4 (empat) tahun, jumlah Retur pada KPPN Pematang Siantar tidak terlalu besar. Namun dengan adanya Retur SP2D, pencairan dana APBN yang diharapkan dapat berhasil 100% (zero Retur) tidak bisa terwujud. Tanpa adanya Retur SP2D. Ketika terjadi Retur, dana yang seharusnya diterima oleh pihak yang berhak menjadi tertunda.

Sebagai contoh, Retur SP2D dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji, honorarium, atau pembayaran kepada vendor dan kontraktor. Keterlambatan ini tidak hanya menghambat operasional pihak penerima, tetapi juga meningkatkan beban administrasi bagi satuan kerja yang harus mengurus pengembalian dan pencairan ulang dana. Selain itu, dana yang mengalami Retur akan mengendap sementara waktu sebelum dapat disalurkan kembali, sehingga menyebabkan pengelolaan kas negara menjadi tidak optimal dan menambah idle cash yang tidak produktif.

Selain itu, Retur SP2D juga berdampak negatif pada indikator kinerja pengelolaan anggaran. Tingginya jumlah retur menunjukkan inefisiensi dan ketidakakuratan dalam proses pencairan dana, yang dapat mempengaruhi penilaian kinerja satuan kerja terkait. Hal ini bisa berdampak pada reputasi dan kepercayaan publik yang merupakan pihak penerima dana APBN, terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola dana secara efektif. Keterlambatan dalam pencairan dana akibat Retur SP2D juga dapat menghambat berbagai program pembangunan dan kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, memastikan SP2D Zero Retur adalah langkah penting untuk mendukung kelancaran aliran dana dan keberhasilan program pemerintah.

Mencegah terjadinya Retur SP2D memerlukan perhatian terhadap detail dan langkah-langkah proaktif yang dapat disampaikan, diantaranya:

1.Verifikasi Data Rekening Penerima Dana

Pastikan bahwa nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank penerima sudah benar dan sesuai dengan yang tercatat di bank. Verifikasi ini dapat dilakukan melalui fasilitas internet banking, mobile banking, atau kanal lainnya. Selain itu, melakukan verifikasi data dengan salinan buku tabungan atau rekening koran terbaru dari penerima dana juga dapat membantu memastikan keakuratan data.

2.Pendaftaran dan Perubahan Data Supplier

PPABP, Operator Komitmen dan PPK memiliki peran penting dalam memastikan perekaman data supplier. Para user tersebut bertanggung jawab untuk menginput dan memverifikasi data supplier dengan teliti, memastikan bahwa setiap detail seperti nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank penerima sudah benar dan sesuai dengan yang tercatat di bank. Selain itu, user ini juga harus memastikan bahwa data supplier selalu diperbarui dan diverifikasi secara berkala untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan Retur SP2D.

3.Pengecekan Status Rekening

Langkah yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa rekening penerima dana berada dalam keadaan aktif atau tidak dalam status pasif, tertutup atau dormant, terutama untuk rekening penerima yang tidak rutin seperti rekening rekanan penyedia barang/jasa pemerintah serta penerima Bantuan Pemerintah baik individu maupun kelompok.

Simpulan

Retur SP2D adalah masalah signifikan dalam pencairan dana pemerintah, disebabkan oleh kesalahan penulisan nama rekening, nomor rekening, atau nama bank penerima yang tidak sesuai, serta rekening penerima yang tidak aktif, tutup, atau pasif. Meskipun jumlah Retur SP2D kecil dibandingkan total penerima, dampaknya tetap tidak bisa diabaikan. Retur SP2D menyebabkan keterlambatan pembayaran, menghambat operasional pihak penerima, dan meningkatkan beban administrasi. Untuk itu, diperlukan verifikasi data rekening, terutama pada saat akan melakukan pendaftaran dan perubahan data supplier, serta pengecekan status rekening secara berkala atau sebelum dilakukan pembayaran. Dengan langkah-langkah ini, risiko terjadinya Retur dapat diminimalkan, dengan harapan aliran dana dari pemerintah kepada para penerima manfaat menjadi lancar, dan mendukung upaya keberhasilan program pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana yang efektif.

Kontributor:


Trisfila Delvia (PTPN Mahir)

KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KPPN PEMATANG SIANTAR

“ZONA INTEGRITAS: MEMBANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI YANG TERUS HIDUP DAN BERKEMBANG”

Pembangunan Zona Integritas merupakan strategi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi. Zona integritas dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan tujuan membangun wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Karena itulah, pembangunan Zona Integritas merupakan proses yang berkelanjutan. KPPN Pematang Siantar sebagai bagian dari instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) senantiasa untuk terus menggiatkan pembangunan zona integritas di lingkungan kerja. KPPN Pematang Siantar juga berupaya menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dan meningkatkan pelayanan bagi stakeholders.





Pada tahun 2024 lalu, KPPN Pematang Siantar telah memperoleh predikat WBBM dari Kementerian PAN-RB. Meskipun telah memperoleh predikat WBBM, KPPN Pematang Siantar terus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan zona integritas dan peningkatan layanan yang dimiliki oleh KPPN Pematang Siantar. Penyebarluasan nilai-nilai integritas dan antikorupsi terus diperdengarkan dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan para stakeholders, antara lain dalam kegiatan press release, sosialisasi, maupun bimbingan teknis serta Island of Integrity. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPN Pematang Siantar pada Triwulan I tahun 2025 antara lain:

Sortali (Sharing our reaction and talking about integrity)

Merupakan inovasi KPPN Pematang Siantar yang berupa kegiatan sharing mengenai integritas baik belajar mengenai tokoh nasional/internasional, film dan pemaparan materi mengenai integritas. Pada Triwulan I 2025 ini, Sortali membahas mengenai film pendek DJP-Antara Benar yang diambil dari Youtube Itjen Kemenkeu pada bulan Januari 2025, internalisasi titik rawan pengaduan pada bulan Februari 2025, dan Pengawasan melekat oleh Lini I pada Maret 2025.

Island of Integrity

Merupakan kegiatan penyebarluasan pembangunan zona integritas kepada stakeholders KPPN Pematang Siantar. Pada Triwulan I 2025, KPPN Pematang Siantar berkesempatan menyampaikan kiat pembangunan zona integritas pada MTSN 2 Simalungun. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh Kepala KPPN, Kepala MTSN 2 Simalungun, dan seluruh jajaran.

Press Release APBN

KPPN Pematang Siantar setiap bulan menyelenggarakan *press release* APBN berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan Satu di Kota Pematangsiantar yaitu KPP Pratama Pematang Siantar, KPPBC Pematang Siantar, dan KPKNL Pematang Siantar. Kegiatan ini merupakan sarana bagi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan perkembangan pendapatan dan belanja di wilayah kerja Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Dalam kegiatan ini juga KPPN Pematang Siantar senantiasa mengajak seluruh peserta untuk menjunjung nilai integritas dan semangat anti korupsi.

Service excellent

Untuk memastikan layanan terbaik dan meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholders, KPPN Pematang Siantar bekerja sama dengan pihak perbankan menyelenggarakan kegiatan *service excellent* bagi seluruh pegawai KPPN Pematang Siantar.

Capacity Building

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi antar pegawai dan seksi/subbagian di KPPN Pematang Siantar yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kualitas kerja yang dihasilkan oleh setiap bagian. Pada triwulan I tahun 2025, *capacity building* mengangkat tema Bersinergi dan Tetap Profesional Melayani di Tengah Efisiensi.

Pembinaan Mental Pegawai

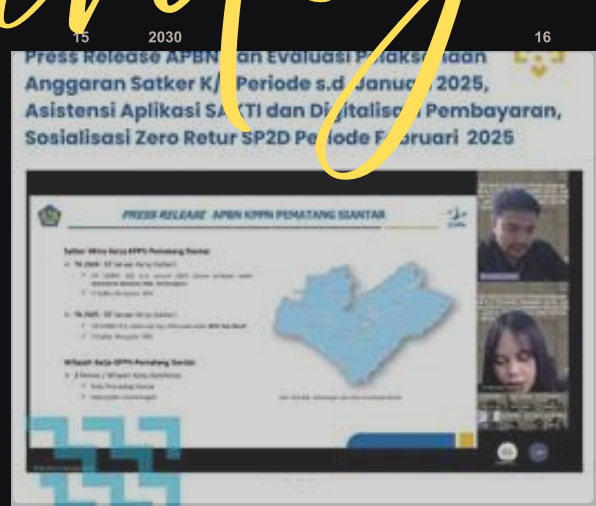
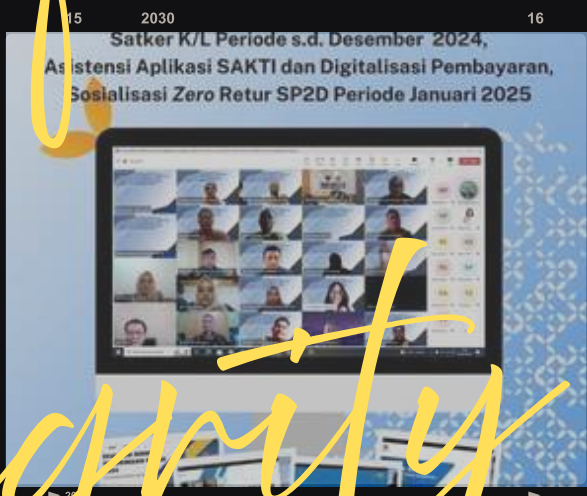
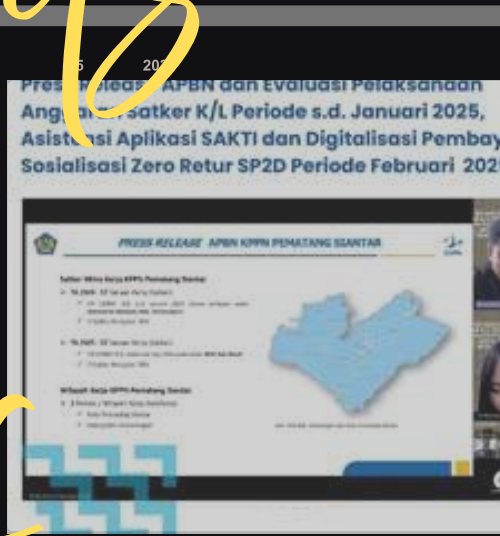
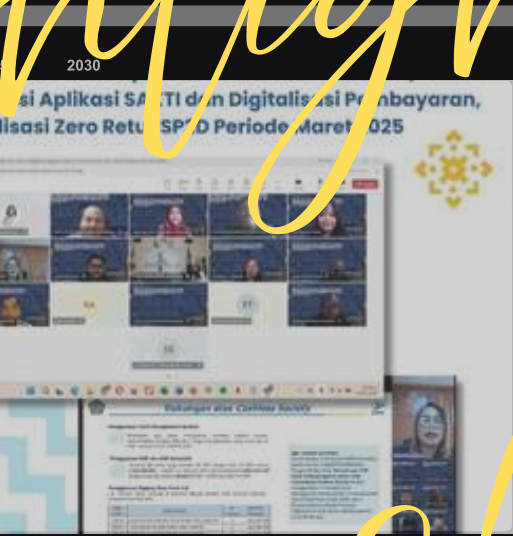
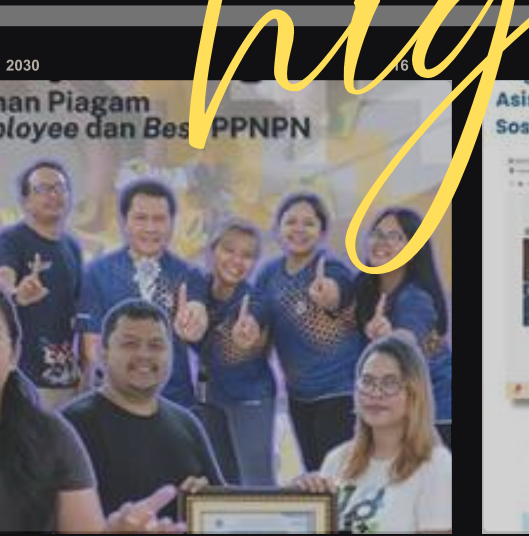
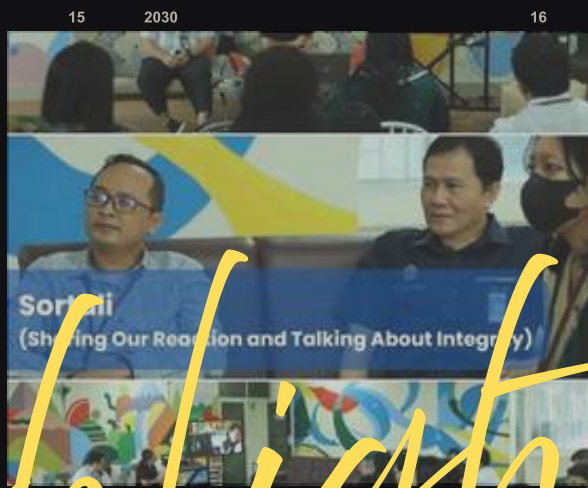
Pembinaan mental bagi pegawai rutin dilaksanakan oleh KPPN Pematang Siantar setiap triwulannya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mental para pegawai. Pada Triwulan I tahun 2025 ini, KPPN Pematang Siantar mengangkat materi pembinaan mental kejiwaan dengan judul Menjaga Keseimbangan Kesehatan Mental dan Hubungan Sosial.

Monitoring dan evaluasi keberlanjutan pembangunan zona integritas

Salah satu kegiatan yang dilakukan rutin setiap bulan adalah monitoring dan evaluasi keberlanjutan pembangunan zona integritas. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan zona integritas terus berlanjut setelah mendapat predikat WBBM serta memastikan seluruh kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi stakeholders dan menjaga nilai integritas, antikorupsi, dan antigratifikasi dalam memberikan layanan kepada stakeholders.

Kontributor:

Yusuf Prihantoro (Kepala Seksi MSKI)



highlights of integrity

20
25

Galeri Kegiatan Bulan Januari



14

FGD Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah Tahun 2024 dengan mengundang BPKPD dan APIP Kota Pematang Siantar dan BPKPD, APIP dan DPMN Kab. Simalungun

Ibadah dan Perayaan Natal KPPN Pematang Siantar dalam Natal Oikumene Kementerian Keuangan Wilayah Pematang Siantar

14



16

Kegiatan Sortali menonton film pendek DJP- Antara Benar dari Youtube Itjen Kemenkeu

Galeri Kegiatan Bulan Januari

Pada Acara Rakorwil Triwulan I Tahun 2025 lingkup Kanwil DJPb Sumatera Utara pada 15-16 Januari 2025, KPPN Pematang Siantar menerima Piagam Penghargaan sebagai Peringkat I dalam kategori Nilai IKPA Terbaik Semester II Tahun 2024 dengan Nilai IKPA 99,64 KPPN Tipe A1 sebagai Kuasa BUN Daerah

16



21

KPPN Pematang Siantar bersama Universitas Simalungun (USI) melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka Kerjasama Akademis dan Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi serta Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan dan Jabatan Fungsional di Bidang Pengelolaan APBN; Optimalisasi Capaian Output Tahun Anggaran 2025; Asistensi SAKTI; dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Satker.

23



20
25

Galeri Kegiatan Bulan Januari

Rapat Identifikasi Risiko dan Penyusunan Profil Risiko 2025

23



23

Rapat Pembahasan Kemajuan Pelaksanaan Kerja Pembangunan Zona Integritas s.d. Desember 2024 serta menyusun Rencana Kerja Mempertahankan Predikat Zona Integritas 2025

Bintal Islam KPPN Pematang Siantar periode Januari 2025

24



24

KPPN Pematang Siantar menghadiri Townhall DJPb secara virtual bersama seluruh unit vertikal DJPb



Galeri Kegiatan Bulan Januari



30

KPPN Pematang Siantar bersama Kementerian Keuangan Satu Wilayah Pematang Siantar dan Simalungun mengadakan Press Release APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L Periode s.d. Desember 2024, Asistensi Aplikasi SAKTI dan Digitalisasi Pembayaran, serta Sosialisasi Zero Retur SP2D Periode Januari 2025

KPPN Pematang Siantar melakukan penandatanganan BAR Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester II Tahun 2024 dengan Pemda Kab. Simalungun dan KPP Pratama Pematangsiantar bertempat di ruang rapat BPKPD Kab. Simalungun

30



30

KPPN Pematang Siantar telah mengadakan Asistensi Penggunaan Aplikasi SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) bagi pelaku usaha UMKM di ruangan Aula KPPN Pematang Siantar.

20
25

Galeri Kegiatan Bulan Februari



6 Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan Pakta Integritas lingkup KPPN Pematang Siantar untuk tahun 2025

FGD Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tema Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa

6



13 KPPN Pematang Siantar Bersama Bank BSI Cabang Pematangsiantar melaksanakan kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding (MoU)) Forum Kerja Sama Peningkatan Kualitas Data Rekening Penerima Pembayaran dan Penerapan Cashless Society.



SORTALI edisi Februari 2025, dengan topik internalisasi titik rawan pengaduan kepada seluruh pegawai di Ruang Kolaborasi

20



20
25

Galeri Kegiatan Bulan Februari

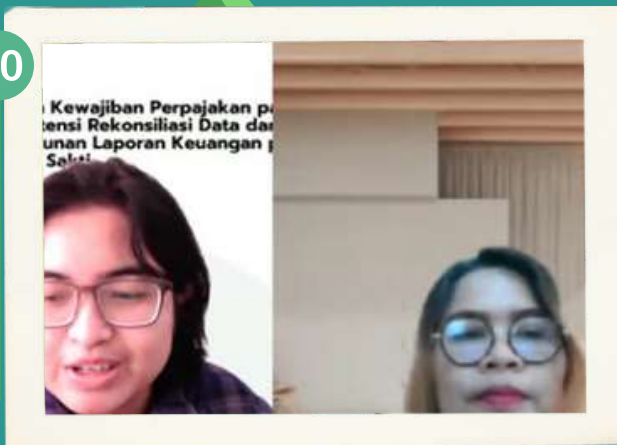


24

KPPN Pematang Siantar melaksanakan Bintal Kristen dan Bintal Islam.

20

Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Asistensi Rekonsiliasi Data dan MONSAKTI dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan periode Unaudited dan Asistensi Aplikasi Sakti



27

KPPN Pematang Siantar Bersama Kementerian Keuangan Satu Wilayah Pematang Siantar dan Simalungun melaksanakan Press Release APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L Periode s.d. Januari 2025, Asistensi Aplikasi SAKTI dan Digitalisasi Pembayaran serta Sosialisasi Zero Retur SP2D Periode Februari 2025





Galeri Kegiatan Bulan Februari



28

Capacity Building Triwulan I Tahun 2025

KPPN Pematang Siantar mengadakan kegiatan pelatihan Service Excellence periode Triwulan I tahun 2025.

27





Galeri Kegiatan Bulan Maret

KPPN Pematang Siantar melaksanakan kegiatan Stakeholders Day.

6



7

KPPN Pematang Siantar mengadakan kegiatan Marsitandaan Periode Triwulan I Tahun 2025



KPPN Pematang Siantar melakukan kunjungan ke BPJS Kesehatan Pematang Siantar dalam rangka koordinasi pengelolaan Dana PFK Iuran Potongan Jaminan Kesehatan PNS Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun.

11



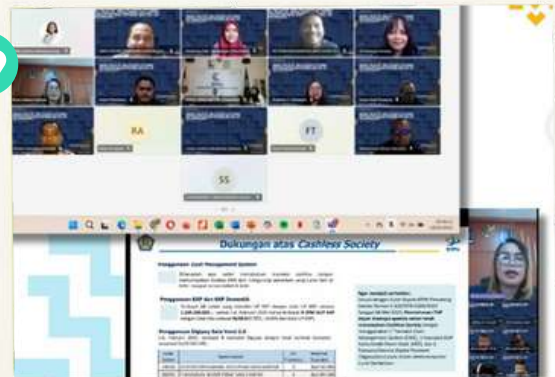


Galeri Kegiatan Bulan Maret



13 KPPN Pematang Siantar melakukan aksi sosial pembagian takjil kepada masyarakat yang melalui Jl. Radjamin Purba (depan KPPN Pematang Siantar), mulai dari masyarakat dengan kendaraan umum (angkot), driver ojek online, pejalan kaki, hingga pengendara sepeda motor.

19 KPPN Pematang Siantar Bersama Kementerian Keuangan Satu Wilayah Pematang Siantar dan Simalungun Press Release APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L Periode s.d. Februari 2025, Asistensi Aplikasi SAKTI dan Digitalisasi Pembayaran serta Sosialisasi Zero Retur SP2D Periode Maret 2025



19 Sosialisasi QLOLA By BRI berkolaborasi bersama BRI KC Pematang Siantar

20 KPPN Pematang Siantar kembali mengadakan kegiatan SORTALI edisi Maret 2025, dengan topik Pengawasan Melekat oleh Lini I kepada seluruh pegawai di Ruang Kolaborasi.



20
25

Galeri Kegiatan Bulan Maret



21

Ibadah Bintal Bulanan KPPN Pematangsiantar

KPPN Pematang Siantar melaksanakan kegiatan Bimbingan Mental Kejiwaan periode Triwulan I Tahun 2025 dan Bakti Sosial kepada PPNPN

25



27

KPPN Pematang Siantar berkoordinasi dengan MTSN 2 Simalungun untuk Sharing Experience terkait pembangunan ZI



TIMBUL (TIM BULETIN)

Penanggung Jawab dan Pengarah

Nova Juliana Sianturi

Pemimpin Redaksi

Roland Fernando

Sekretaris Media

Imelda Octavia Damanik

Kontributor

Zulfan

Tommy Hansen Panjaitan

Surya Hadi Purnama

Yusuf Prihantoro

Roland Fernando

Anggiat Tambunan

Chiltry R Hutahaean

Trisfila Delvia

Copywriter

Nurhawati Tampubolon

Imelda Octavia Damanik

Uli Natasya Girsang

Editor

Roby Adiyansyah Sinaga

Norman Rilo Turnip

Prima Sari Rumapea

M. Fadly



Penata Letak dan Grafis

Armansyah Putra Barus

Ranissa P. Purba

Nelly Desima S.

Louise Andrea Medeleine Sianturi

Fotografer

Boby



KPPN PEMATANGSIANTAR
Jl. Rajamin Purba No.119, Pematangsiantar,
Sumatera Utara

